

ANALISIS SOSIAL DAN DEMOGRAFI DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN WILAYAH: KAJIAN BERDASARKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN LAMONGAN

Mohammad Huda ¹⁾, Nasywa Aulia Baril Haq ¹⁾
1) Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Negeri Surabaya

**Corresponding author:*
E-mail: 24051874078@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sosial dan demografi Kabupaten Lamongan dalam perspektif pembangunan wilayah berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan pembangunan antar wilayah yang masih terjadi akibat perbedaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappelitbangda Lamongan, penelitian ini mengkaji hubungan antara variabel sosial-demografi dengan capaian IPM di 27 kecamatan. Metode analisis kluster digunakan untuk mengelompokkan kecamatan berdasarkan kesamaan nilai IPM dan indikator penyusunnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kecamatan di Kabupaten Lamongan yang mencapai kategori IPM tinggi. Hanya dua kecamatan—Solokuro dan Mantup—berada pada kategori sedang, sedangkan 25 kecamatan lainnya tergolong rendah. Ketimpangan paling signifikan terjadi pada dimensi ekonomi, di mana sebagian besar wilayah memiliki nilai Indeks Ekonomi Proxy (IEP) mendekati nol, menandakan rendahnya kemandirian ekonomi dan keterbatasan sektor produktif. Pola spasial menunjukkan bahwa wilayah selatan relatif lebih maju dibanding wilayah utara dan tengah. Berdasarkan hasil analisis, disusun tiga zona prioritas pembangunan yang berfokus pada peningkatan ekonomi lokal, pemerataan layanan dasar, serta intervensi sosial bagi wilayah tertinggal. Penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan wilayah berkelanjutan harus didasarkan pada pemerataan kualitas sumber daya manusia. Dengan memperkuat sinergi antara kebijakan sosial, ekonomi, dan spasial, diharapkan Kabupaten Lamongan dapat mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, sosial-demografi, pembangunan wilayah, Lamongan, keberlanjutan

Abstract

The research is motivated by persistent development disparities between regions due to differences in access to education, health, and economic opportunities. By employing a quantitative approach through the analysis of secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) and the Regional Development Planning Agency of Lamongan (Bappelitbangda), this study examines the relationship between socio-demographic variables and HDI achievements across 27 sub-districts. Cluster analysis is applied to group sub-districts based on similarities in HDI scores and their constituent indicators.

The results indicate that no sub-district in Lamongan Regency reaches a high HDI category. Only two sub-districts—Solokuro and Mantup—fall into the medium category, while the remaining 25 sub-districts are classified as low. The most significant disparities occur in the economic dimension, where the majority of areas have Proxy Economic Index (PEI) values close to zero, reflecting low economic self-reliance and limited productive sectors. Spatial patterns show that the southern region is relatively more developed compared to the northern and central regions. Based on the analysis, three priority development zones were identified, focusing on enhancing local economies, equalizing basic services, and implementing social interventions in underdeveloped areas.

This study underscores that sustainable regional development must be grounded in the equitable improvement of human resource quality. By strengthening the synergy between social, economic, and spatial policies, it is expected that Lamongan Regency can achieve more inclusive and equitable growth.

Keywords: Human Development Index, socio-demographics, regional development, Lamongan, sustainability

This is an open access article under the CC-BY-SA

license



PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat setiap tahun menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap pemerataan pembangunan wilayah. Berdasarkan data Trading Economics (2024), jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 281,6 juta jiwa pada tahun 2024. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk menerapkan strategi pembangunan yang efektif dan inklusif agar mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Salah satu indikator penting yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang terdiri atas tiga indikator utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Melalui IPM, pemerintah dapat menilai sejauh mana kesejahteraan masyarakat telah tercapai dan mengidentifikasi ketimpangan yang masih terjadi di tingkat daerah.

Laporan Human Development Report (UNDP, 2023) menyatakan bahwa ketimpangan pembangunan manusia yang stagnan pasca-gejolak global memerlukan analisis menyeluruh terhadap faktor sosial dan demografi yang mempengaruhinya. Dalam konteks Indonesia, perbedaan tingkat pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan besar dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Lamongan sebagai salah satu daerah dengan kepadatan penduduk tinggi di Provinsi Jawa Timur memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan. Potensi tersebut juga belum sepenuhnya diimbangi dengan pemerataan pembangunan yang merata antar kecamatan. Ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi menjadi faktor hambatan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Analisis terhadap kondisi sosial-demografi Kabupaten Lamongan melalui pendekatan berbasis IPM menjadi penting untuk memahami pola ketimpangan pembangunan wilayah. Dengan menelaah hubungan antara faktor sosial dan demografi terhadap capaian IPM, penelitian ini berupaya memberikan dasar ilmiah dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana IPM berpengaruh terhadap arah dan prioritas pembangunan wilayah di Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian yang diharapkan adalah dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu geografi pembangunan dan studi kependudukan, sekaligus dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan berbasis data dan kebutuhan lokal.

Penelitian ini memiliki relevansi sosial yang kuat karena hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas sumber daya manusia sebagai faktor utama pembangunan. Dengan memperkuat keterlibatan masyarakat serta memperhatikan dimensi sosial, ekonomi, dan spasial secara seimbang, pembangunan wilayah Lamongan diharapkan mampu mencapai pertumbuhan yang inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan manusia merupakan konsep yang menempatkan manusia sebagai pusat dan tujuan utama dari seluruh proses pembangunan. Menurut United Nations Development Programme (UNDP, 1990), pembangunan manusia tidak sekadar diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih menekankan pada perluasan kapasitas individu agar mampu menjalani kehidupan yang sehat, berpendidikan, dan sejahtera. Dalam konteks ini, pembangunan manusia mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi sebagai faktor fundamental yang menentukan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan suatu wilayah tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produk domestik bruto (PDB), tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan instrumen kuantitatif yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Sejak pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada awal 1990-an, IPM telah menjadi indikator utama dalam menilai kualitas hidup manusia secara global. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mengadopsi tiga komponen utama dalam penghitungan IPM, yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) untuk dimensi kesehatan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) untuk dimensi pendidikan, serta

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan sebagai cerminan standar hidup. Dengan demikian, IPM berfungsi sebagai alat analisis yang tidak hanya mengukur kemajuan suatu wilayah, tetapi juga mengidentifikasi kesenjangan pembangunan antar daerah.

Dalam kerangka pembangunan wilayah, IPM memiliki relevansi strategis karena menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan lokal. Kabupaten dengan nilai IPM tinggi umumnya menunjukkan kinerja pembangunan yang lebih baik dari segi infrastruktur, pelayanan publik, dan akses ekonomi, sementara daerah dengan IPM rendah cenderung menghadapi tantangan struktural seperti keterbatasan akses pendidikan, rendahnya produktivitas ekonomi, serta lemahnya fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, IPM tidak hanya berfungsi sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat, tetapi juga sebagai alat diagnosis bagi perencanaan pembangunan wilayah yang efektif.

Konsep pembangunan wilayah sendiri menekankan pada upaya meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya alam, manusia, dan infrastruktur untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan wilayah bersifat holistik karena mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan tata ruang. Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih luas dalam menentukan arah pembangunan sesuai karakteristik lokal. Dengan demikian, pembangunan wilayah di Indonesia diarahkan pada prinsip pemerataan, penguatan konektivitas antar wilayah, serta pengembangan kawasan strategis melalui rencana jangka menengah dan panjang nasional.

Berbagai teori pembangunan wilayah mendasari pendekatan analisis dalam penelitian ini. Teori Growth Pole yang dikemukakan oleh François Perroux menjelaskan bahwa pembangunan tidak terjadi secara merata, melainkan berpusat pada beberapa wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Dari pusat pertumbuhan tersebut, pembangunan kemudian menyebar ke wilayah sekitarnya melalui efek penggandaan ekonomi. Sementara itu, teori Cumulative Causation dari Myrdal menekankan bahwa pertumbuhan yang tidak merata dapat menciptakan lingkaran kumulatif di mana wilayah maju semakin maju, sedangkan wilayah tertinggal semakin terpuruk akibat keterbatasan modal dan sumber daya. Kedua teori tersebut relevan dalam memahami kesenjangan pembangunan antar kecamatan di Kabupaten Lamongan yang menunjukkan perbedaan signifikan dalam dimensi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Selain teori pembangunan wilayah, penelitian ini juga menggunakan pendekatan proxy indicators atau indikator proksi sebagai alat bantu analisis. Indikator proksi digunakan untuk mewakili fenomena yang sulit diukur secara langsung, seperti tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks IPM, setiap dimensi menggunakan indikator proksi—misalnya Umur Harapan Hidup sebagai proksi kesehatan, Rata-rata Lama Sekolah sebagai proksi pendidikan, dan Pengeluaran per Kapita sebagai proksi kesejahteraan ekonomi. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan gambaran empiris yang lebih akurat terhadap variasi pembangunan manusia antarwilayah.

Sejumlah penelitian terdahulu juga menunjukkan relevansi IPM dalam konteks pembangunan wilayah. Penelitian yang dilakukan oleh Pradana dan Susilowati (2022) menemukan bahwa IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan, sementara pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Temuan serupa dikemukakan oleh Susanto (2013) yang menyatakan bahwa IPM berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi berdampak negatif melalui penurunan daya beli masyarakat. Kajian lain oleh BPS (2024) menegaskan bahwa meskipun IPM Lamongan terus meningkat setiap tahun, masih terdapat kesenjangan antar dimensi, khususnya dalam aspek daya beli dan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan studi dokumenter/data sekunder. Survei dipakai untuk mengumpulkan data primer terkait aspek sosial demografi seperti pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, dan akses pelayanan publik yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan studi dokumenter menggunakan data sekunder dari berbagai sumber resmi seperti BPS, Bappeda, dan laporan terkait yang mencakup data IPM, kependudukan, kesehatan, pendidikan, serta ekonomi di Kabupaten Lamongan.

Tempat penelitian di Kabupaten Lamongan, dengan pengumpulan data selama kurun waktu 2015-2024 yang memperlihatkan tren perubahan IPM di tingkat desa dan kecamatan. Populasi mencakup seluruh unit wilayah dan rumah tangga dengan pengambilan sampel menggunakan teknik stratifikasi berbasis wilayah administrasi. Jenis data terdiri dari data sekunder objektif, terstandarisasi, dan relevan dengan pembangunan manusia dan wilayah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi statistik resmi, laporan pemerintah daerah dan lembaga internasional, serta studi kepustakaan untuk memperkuat kerangka teori dan analisis data. Teknik analisis data utama adalah analisis kluster sederhana yang mengelompokkan kecamatan berdasarkan nilai IPM dan indikator sosial demografi, melalui tahapan standarisasi data, pembentukan kluster, hingga interpretasi hasil untuk memahami kesenjangan dan kebutuhan pembangunan.

Metode ini membantu pemerintah daerah merancang kebijakan pembangunan berbasis lokasi dengan intervensi sesuai kebutuhan spesifik tiap wilayah, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pembangunan manusia secara proporsional dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Proxy untuk 27 kecamatan di Kabupaten Lamongan, yang diperoleh melalui pendekatan perhitungan aritmetika sederhana berdasarkan tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu Kesehatan, Pendidikan, dan Ekonomi. Setiap dimensi diukur dengan indikator spesifik, yakni Child Mortality Rate (CMR) untuk dimensi Kesehatan, Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk dimensi Pendidikan, serta Indeks Ekonomi Proxy (IEP) yang mencerminkan tingkat kemandirian dan aktivitas ekonomi di tingkat desa.

Nilai dari ketiga dimensi tersebut kemudian menjalani proses normalisasi pada skala 0–1 guna memastikan bobot yang seimbang, diikuti oleh perhitungan rata-rata untuk memperoleh skor IPM Proxy per kecamatan. Hasil perhitungan mengungkapkan adanya disparitas yang signifikan antar wilayah, baik pada tingkat dimensi maupun antar kecamatan.

Tabel 4.1 di bawah ini menyajikan hasil normalisasi dan perhitungan IPM Proxy, beserta kategori berdasarkan skor yang diperoleh.

Tabel 4.1: Hasil Normalisasi dan Perhitungan IPM Proxy per Kecamatan di Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	I_Kesehatan	APK	IEP	IMP Proxy	Kategori
1	Solokuro	0,479	0,257	1,000	0,579	Sedang
2	Mantup	0,435	0,315	0,751	0,500	Sedang
3	Sukorame	1,000	0,475	0,000	0,492	Rendah
4	Bluluk	0,783	0,152	0,476	0,470	Rendah
5	Karanggeneng	0,479	0,675	0,239	0,464	Rendah
6	Ngimbang	0,305	0,336	0,751	0,464	Rendah
7	Kalitengah	0,783	0,065	0,429	0,426	Rendah

8	Lamongan	0,392	0,844	0,000	0,412	Rendah
9	Paciran	0,218	1,000	0,000	0,406	Rendah
10	Laren	0,827	0,189	0,000	0,339	Rendah
11	Maduran	0,479	0,505	0,000	0,328	Rendah
12	Kedungpring	0,653	0,309	0,000	0,321	Rendah
13	Sarirejo	0,000	0,000	0,953	0,318	Rendah
14	Babat	0,348	0,560	0,000	0,303	Rendah
15	Turi	0,478	0,146	0,226	0,283	Rendah
16	Modo	0,566	0,176	0,000	0,247	Rendah
17	Deket	0,521	0,209	0,000	0,243	Rendah
18	Sekaran	0,348	0,291	0,000	0,213	Rendah
19	Brondong	0,391	0,207	0,000	0,199	Rendah
20	Sugio	0,261	0,336	0,000	0,199	Rendah
21	Kembangbahu	0,305	0,284	0,000	0,196	Rendah
22	Glagah	0,391	0,157	0,000	0,183	Rendah
23	Pucuk	0,305	0,232	0,000	0,179	Rendah
24	Sukodadi	0,305	0,169	0,000	0,158	Rendah
25	Karangbinangun	0,347	0,116	0,000	0,154	Rendah
26	Tikung	0,305	0,122	0,000	0,142	Rendah
27	Sambeng	0,261	0,046	0,000	0,102	Rendah

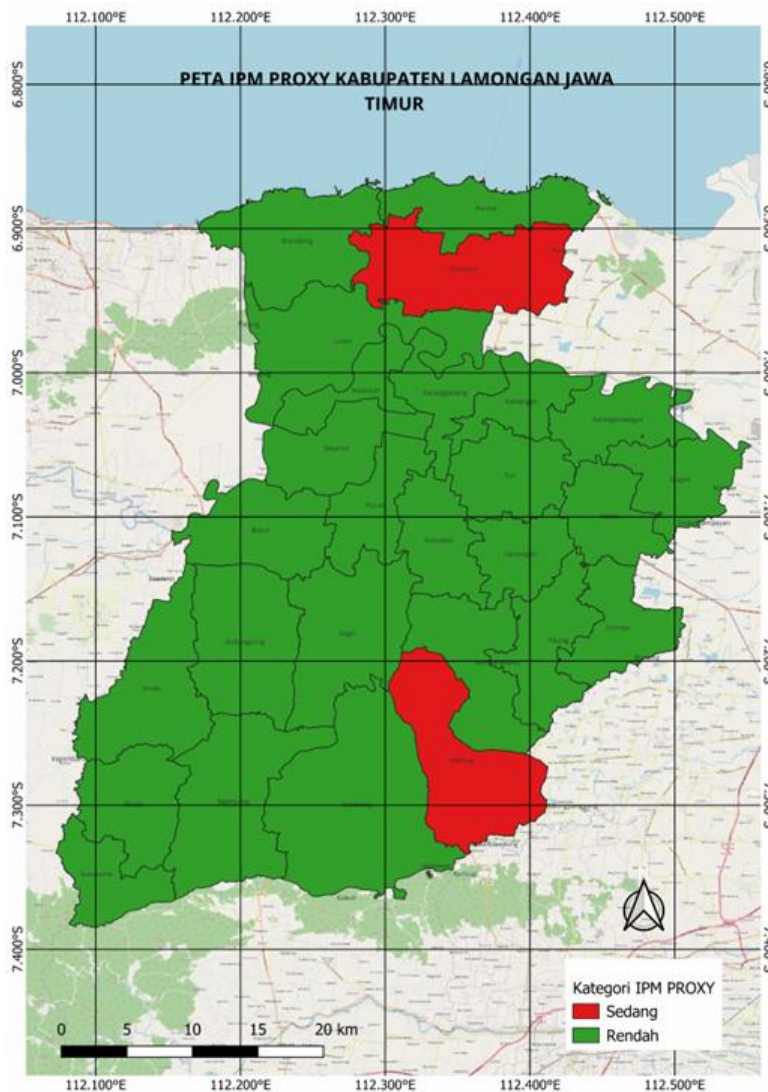
Hasil penelitian mengindikasikan bahwa dimensi Ekonomi memberikan kontribusi terendah terhadap pembentukan IPM Proxy, di mana sebagian besar kecamatan mencatat nilai IEP sebesar 0, yang mencerminkan tingkat kemandirian ekonomi masyarakat yang masih sangat terbatas. Kondisi ini menggambarkan adanya keterbatasan peluang usaha, akses terhadap sumber permodalan yang tidak memadai, serta kurangnya pengembangan sektor produktif di wilayah pedesaan.

Sebaliknya, kecamatan seperti Solokuro, Mantup, dan Ngimbang menunjukkan performa ekonomi lokal yang relatif lebih unggul, ditandai dengan nilai IEP di atas 0,7. Fenomena ini mengimplikasikan adanya potensi kewirausahaan atau sektor unggulan tertentu, seperti perdagangan atau pertanian yang produktif, yang perlu diperkuat melalui kebijakan pemerintah yang tepat.

Dimensi Pendidikan menampilkan variasi yang signifikan, di mana kecamatan Paciran, Lamongan, dan Karanggeneng memperoleh APK yang tinggi, mengindikasikan tingkat partisipasi pendidikan yang memadai. Namun, kecamatan seperti Kalitengah, Sambeng, dan Karangbinangun mengalami APK yang rendah, yang mencerminkan keterbatasan akses dan minat terhadap pendidikan, khususnya pada jenjang sekolah menengah.

Adapun dimensi Kesehatan menunjukkan pola yang cenderung sedang hingga tinggi di wilayah selatan seperti Sukorame, Bluluk, dan Laren, tetapi masih rendah di wilayah lain seperti Sarirejo, yang memiliki CMR tertinggi. Hal ini menekankan pentingnya pemerataan layanan kesehatan dasar, termasuk fasilitas seperti posyandu, puskesmas pembantu, dan program gizi bagi ibu dan anak.

Analisis pola spasial IPM Proxy mengungkapkan bahwa wilayah dengan capaian pembangunan manusia yang relatif lebih baik terutama terdapat di bagian selatan Kabupaten Lamongan, seperti kecamatan Solokuro, Mantup, dan Ngimbang, sementara wilayah tengah dan utara, termasuk Tikung, Sambeng, dan Karangbinangun, mencatat nilai IPM yang rendah. Faktor-faktor yang menjadi penyebab ketimpangan ini meliputi keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur di wilayah utara, yang mengakibatkan ketertinggalan dalam layanan transportasi dan publik; dominasi sektor ekonomi primer, seperti pertanian tradisional, tanpa adanya pengolahan bernilai tambah; serta konsentrasi pusat pertumbuhan di wilayah perkotaan seperti Lamongan dan Babat. Kondisi ini menghasilkan ketidakseimbangan spasial antara pusat dan wilayah pinggiran, di mana kecamatan dengan infrastruktur yang lebih baik cenderung mencapai IPM yang lebih tinggi.



Gambar 1. Peta IPM Proxy Kabupaten Lamongan Jawa Timur

Berdasarkan hasil perhitungan IPM Proxy, Kabupaten Lamongan dapat dikategorikan menjadi tiga zona prioritas pembangunan manusia sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan wilayah:

- Zona A: Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi Meliputi kecamatan Solokuro, Mantup, Ngimbang, dan Sarirejo. Fokus pembangunan difokuskan pada penguatan ekonomi inklusif, seperti pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pelatihan vokasional, peningkatan akses pasar, serta dukungan pembiayaan bagi usaha kecil. Kebijakan yang direkomendasikan mencakup pembentukan klaster ekonomi lokal dan inkubasi usaha di tingkat desa.

- Zona B: Peningkatan Layanan Dasar Meliputi kecamatan Karanggeneng, Lamongan, Bluluk, Laren, dan Kedungpring. Upaya pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, termasuk rehabilitasi infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, fasilitas sekolah, dan puskesmas, serta pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan produktif.
- Zona C: Intervensi Dasar dan Pemerataan Akses Meliputi kecamatan Sambeng, Tikung, Karangbinangun, Sukodadi, dan sekitarnya. Wilayah ini memerlukan intervensi mendesak, seperti peningkatan akses pendidikan dasar, program pengentasan buta huruf, layanan kesehatan keliling, serta pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin melalui inisiatif padat karya.

Kesenjangan IPM antar kecamatan mengindikasikan bahwa pembangunan di Kabupaten Lamongan belum sepenuhnya selaras dengan prinsip pertumbuhan yang merata (equitable growth), sebagaimana direkomendasikan dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs). Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan strategi integratif berbasis wilayah, yang meliputi:

- Strategi sosial: Penguatan pendidikan dasar dan layanan kesehatan masyarakat sebagai dasar peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- Strategi ekonomi: Perluasan basis ekonomi produktif lokal melalui pemberdayaan UMKM, inovasi di tingkat desa, dan penguatan sektor pertanian dengan nilai tambah.
- Strategi spasial: Pendorongan pemerataan pembangunan dengan perbaikan aksesibilitas antar kecamatan serta pemanfaatan potensi lokal secara seimbang.

Pendekatan ini tidak hanya diharapkan dapat meningkatkan nilai IPM secara keseluruhan, tetapi juga mendukung terciptanya struktur wilayah yang lebih seimbang dan berdaya saing, sehingga berkontribusi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan.

SIMPULAN

Dari hasil analisis IPM dapat diketahui bahwa mayoritas kecamatan di kabupaten lamongan masih memiliki ketimpangan pada aspek ekonomi, sedangkan pada pendidikan dan kesehatan lebih baik di beberapa wilayah. Perencanaan pembangunan wilayah perlu untuk memfokuskan pada aspek ekonomi melalui peningkatan kemandirian ekonomi desa, pemerataan akses pendidikan, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Diharapkan bahwa strategi pembangunan melalui zona prioritas dapat menjadi dasar dalam menyusun rencana aksi kecamatan (RAK) dengan lebih terarah dan berbasis pada data.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappelitbangda Kabupaten Lamongan. (2024). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan. Diakses dari: bappelitbangda.lamongankab.go.id
- BPS Kabupaten Lamongan. (2024). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan 2024. Badan Pusat Statistik. Diakses dari: lamongankab.bps.go.id
- Pradana, D. A. N., & Susilowati, D. (2022). Analisis Pengaruh ADD, IPM, dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 6(2), 304-313. DOI: 10.22219/jie.v6i2.20631
- Salsabila, A., Ramadhani, Z., Purba, G., Zuanda, M. A., Asnidar, A., & Ridha, A. (2025). Peran Indeks Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Terhadap Kemiskinan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 4(1), 192-208.
- Susanto, A. B. (2013). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3). Diakses dari: ejournal.unesa.ac.id
- United Nations Development Programme. (2023). Human development report 2023/2024: Breaking the gridlock—Reimagining cooperation in a polarized world. United Nations. <https://hdr.undp.org>

- BPS Kabupaten Lamongan. (2024). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan 2024. Badan Pusat Statistik.
- Pradana, D. A. N., & Susilowati, D. (2022). Analisis pengaruh ADD, IPM, dan jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 6(2), 304–313. <https://doi.org/10.22219/jie.v6i2.20631>
- Salsabila, A., Ramadhani, Z., Purba, G., Zuanda, M. A., Asnidar, A., & Ridha, A. (2025). Peran Indeks Pembangunan Manusia dan kesejahteraan terhadap kemiskinan dan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 4(1), 192–208.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- United Nations Development Programme. (2023). *Human development report 2023/2024: Breaking the gridlock—Reimagining cooperation in a polarized world*. United Nations. <https://hdr.undp.org>
- Bappelitbangda Kabupaten Lamongan. (2024). *Laporan pembangunan daerah Kabupaten Lamongan*. Pemerintah Kabupaten Lamongan.